

**ANALISIS PENGARUH PDRB, IPM, TINGKAT PENGANGGURAN DAN  
BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI  
JAWA TIMUR  
TAHUN 2012-2017**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Nama : Dimas Lutfi Adhi N**

**NIM : 15313100**

**Prodi Studi : Ilmu Ekonomi**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

**2019**

**ANALISIS PENGARUH PDRB, IPM, TINGKAT PENGANGGURAN DAN  
BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI  
JAWA TIMUR TAHUN 2012-2017**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh  
gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Dimas Lutfi Adhi Nugoho

Nomor Mahasiswa : 15313100

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UIL. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

Penulis,



Dimas Lutfi Adhi Nugroho

PENGESAHAN

Analisis Pengaruh PDRB, IPM, Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk  
Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2012-2017

Oleh:

Nama : Dimas Lutfi Adhi Nugroho

NIM : 15313100

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Suharto, S.E., M.Si.

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH PDRB, IPM, TINGKAT PENGANGGURAN DAN BELANJA  
PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012-  
2017**

Disusun Oleh : **DIMAS LUTFI ADHI NUGROHO**  
Nomor Mahasiswa : **15313100**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 9 September 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Suharto, SE., M.Si.**

Penguji : **Awan Setya Dewanta, Drs., M.Ec.Dev.**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



**Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.**

## HALAMAN MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 6-8)

“Sukses bukan milik orang yang punya IPK tinggi saja.”

BJ Habibie

**“Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant of your success.”**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah serta kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Skripsi ini dipersembahkan penulis untuk :

1. ALLAH SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang selalu ada di setiap langkahku dalam memberikan kekuatan, kemampuan dan menjaga etos perjuangan untuk dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan optimis.
2. Bapak dan Ibu tercinta atas segalanya yang telah diberikan kepada saya hingga saat ini, untuk segala doa dan pengorbanan kalian. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya.
3. Teman dan sahabat tercinta saya yang selalu mendukung saya.



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirrabil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH PDRB, IPM, TINGKAT PENGANGGURAN DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2017”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Suharto, S.E., M.Si.** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan arahnya selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, baik kemampuan, wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatka bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang sangat berarti sehingga kesulitan yang ada dalam proses penyusunan skripsi ini dapat diatasi dengan baik. Melalui kesempatan ini dengan segenap kerendahan hatu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang secara langsung membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dan ucapan ini dihaturkan kepada:

1. Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan yang dilimpahkan-Nya kepada penulis selama menulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.



2. Kedua Orang tuaku, Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan maupun motivasinya selama perkuliahan ini, yang sudah mempercayai untuk bisa berkuliah dijogja dan yang memfasilitasi segala kebutuhan dengan cukup semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin. *Thanks a lot and I love you so much!!!*
3. Untuk yang selalu ada Adik kandung ku Khaleda dan Kaka Aditya terimakasih sudah memberikan do'a, perhatian dan pengertian kepada kakakmu ini, semoga kita bisa menjadi orang yang selalu bermanfaat untuk semua orang. Aamiin Ya Rabbal Alamin. *Be success and I love too much you are.*
4. Seluruh Keluarga besar terimakasih atas semua doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis semoga selalu dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusan. Aamiin Ya Rabbal Alamin.
5. Bapak Suharto, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan waktunya untuk saran, motivasi, dan bimbingan serta arahnya. Terimakasih atas ilmu dan bimbingan yang telah bapak berikan.
6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Drs. Agus Widarjono, MA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
9. Bapak Dwi Anjar Suseno, bapak prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
10. Seluruh Dosen Ilmu Ekonomi dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

11. Kepada Husna, Arif, Pandu, Niam, Rio, Rizki, Dhani dan Satria.  
Semoga tali persaudaraan kita berlangsung selamanya.
12. Kepada sahabat saya dari kecil Rommy, Hasib, Tama, Faza, Pras, Nino, Ejung dan Febri yang selalu ada saat suka maupun duka, selalu memotivasi dan menyemangati saya.
13. Sahabat – sahabat saya dari kelas Bridging G yang menemani dan mensupport saya dari awal perkuliahan sampai saat ini. *Love!!!*
14. Terima kasih untuk keluarga besar Ilmu Ekonomi telah banyak membantu, berbagi ilmu, dan saling mendukung dan memberikan semangat dalam kegiatan perkuliahan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang karena telah membantu peneliti dalam segala hal.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam proses menerapkan ilmu yang penulis dapatkan di perkuliahan. Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk lebih menyempurnakan skripsi ini dimasa mendatang penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dengan harapan agar dapat bermanfaat berguna bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

Penulis,

Dimas Lutfi Adhi Nugroho

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kegunaan Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Kajian Pustaka .....	15
2.1 Landasan Teori .....	16
2.2.1 Kemiskinan .....	16
2.2.2 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).....	20
2.2.3 IPM (Indeks Pembangunan Manusia).....	22
2.2.4 Tingkat Pengangguran .....	24
2.2.5 Belanja Pemerintah/Pengeluaran Pemerintah.....	26
2.2 Kerangka Pemikiran .....	27
2.3 Hipotesis Penelitian.....	27
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN .....	28
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data .....	28

3.1.1 Jenis Data.....	28
3.1.2 Sumber Data .....	28
3.1.3 Metode Pengumpulan Data.....	29
3.2 Variable Penelitian dan Definisi Oprasional .....	29
3.2.1 Variable Dependen .....	30
3.2.2 Variabel Independen.....	30
3.3 Metode Analisis Data .....	31
3.3.1 Metode Analisi Data Panel .....	31
3.3.2 Pemilihan Metode Estimasi Data Panel.....	33
3.3.3 Uji Pemilihan Model.....	35
3.3.4 Uji Statistik .....	36
BAB IV .....	39
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Deskripsi Data .....	39
4.2 Hasil Analisis Data .....	40
4.2.1 Uji Signifikansi <i>Cammon Effect</i> (CEM).....	40
4.4.2 Uji Signifikasi <i>Fixed Effect</i> (FEM).....	40
4.4.3 Uji Signifikasi <i>Random Effect Model</i> (REM).....	41
4.3 Pemilihan Model Regresi .....	42
4.3.1 Likelihood Ration ( Uji Chow).....	42
4.3.2 Uji Hausman .....	42
4.4. Model Terbaik .....	43
4.5 Hasil Analisi Data.....	44
4.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	44
4.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji F).....	45
4.5.3 Uji Statistik T.....	45
4.5.4 Analisis Ekonomi.....	46
4.6 Pembahasan .....	47
4.6.1 Analisis pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan .....	47
4.6.2 Analisis pengaruh IPM terhadap Tingkat kemiskinan.....	48
4.6.3 Analisis pengaruh Tingkat Pengangguran thdp Tingkat Kemiskinan ..	48
4.6.4 Analisis pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan	49

BAB V.....	50
KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2.Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	52
LAMPIRAN.....	56



## DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia.....	5
1.2 Indeks Pembangunan Manusia.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
4.1 Statistik Deskriptif Variable Penelitian.....	40
4.2 Hasil Regresi <i>Common Effect Model</i> (CEM) .....	41
4.3 Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) .....	41
4.4 Hasil Regresi <i>Random Effect Model</i> (REM).....	42
4.5 Hasil Uji Chow.....	43
4.6 Hasil Uji Hausman.....	44
4.7 Hasil Regresi <i>FIX EFFECT MODEL</i> (FEM) .....	44
4.8 Hasil Pengujian Hipotesis.....	46
4.9 Hasil <i>Cross Section Effect</i> .....	47

## DAFTAR GAMBAR

1.1 5 Provinsi Dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbesar di Indonesia.....	6
1.2 Tingkat Pengangguran.....	9
1.3 Belanja Total Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2017.....	11
2.2 Kerangka Pemikiran.....	27



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Lampiran 2 Hasil Regresi *Common Effect Model*

Lampiran 3 Hasil Regresi *Fix Effect Model*

Lampiran 4 Hasil Regresi *Random Effect Model*

Lampiran 5 Hasil Uji Chow

Lampiran 6 Hasil Uji Hausman





## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran, dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2012 – 2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan regresi panel dengan metode estimasi *Fixed Effect* menggunakan *software Eviews 9*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel IPM dan Belanja Pemerintah memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan, Sedangkan variable PDRB dan Tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

**Kata Kunci :** *Pengaruh PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran Dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan kemiskinan*



## ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of GRDP, HDI, Unemployment Rate, and Government Spending on Poverty in East Java Province in 2012 - 2017. The type of data used in this study is secondary data. The analytical method used is the quantitative method with panel regression with the Fixed Effect estimation method using Eviews 9 software. The results of this study indicate that the variable HDI and Government spending has an influence on poverty, While the GRDP variable and unemployment rate do not have an effect on poverty in East Java Province.

**Keywords:** Effect of GRDP, HDI, Unemployment Rate and Government Spending on Poverty poverty



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah proses atau alat untuk mencapai tujuannya yaitu permasalahan kesejahteraan masyarakat, dimana negara tersebut semakin maju ketika ada peningkatan pada kesejahterannya. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mengurangi pengangguran ataupun kemiskinan yang ada (Rustam 2010). Selain pertumbuhan ekonomi salah satu aspek yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan ekonomi adalah seberapa besar efektifitas penggunaan sumber daya yang tersedia (Yacoub 2012).

Kemiskinan di negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun beberapa negara telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional (Sartika et al. 2016). Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah tersebut (Christianto, 2013) . Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian.

Kemiskinan merupakan isu sentral bagi setiap negara di dunia, khususnya bagi negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan akhir suatu negara. Berbagai pemikiran maupun konsep-konsep tentang kemiskinan sudah dikaji dan diadaptasi diberbagai negara namun

tidak membuahkan hasil yang memuaskan, dalam konteks ini Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah berumur 57 tahun, masih dihinggap oleh masalah kemiskinan dimana 14% rakyat Indonesia dari kurang lebih 240 juta jiwa saat ini masih dikategorikan sebagai rakyat miskin dengan menggunakan indikator berpendapatan 1 \$ perhari, artinya masih ada sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia. Yang lebih ironis apabila kita menggunakan indikator dari bank dunia dimana rakyat miskin adalah orang berpendapatan kurang dari 2\$ perhari maka angka tersebut melonjak menjadi 35%. (World Bank Document, 2015).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat dalam lima tahun terakhir dibandingkan dengan negara-negara kawasan, ternyata belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga ternyata tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dapat mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, serta belum menghilangkan tingkat disparitas antara golongan kaya dan golongan miskin.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Suparlan (2000) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja. Lebih jauh lagi, kemiskinan berarti suatu kondisi di mana orang atau kelompok orang tidak mempunyai kemampuan, kebebasan, aset dan aksesibilitas untuk kebutuhan mereka di waktu yang akan datang, serta sangat rentan (*vulnerable*) terhadap resiko dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit dan peningkatan secara tiba-tiba atas harga-harga bahan makanan dan uang sekolah (UNCHS, 1996; Pandji-Indra, 2001).

Lingkar perangkap kemiskinan (*the vicious circle of poverty*), atau dengan singkat perangkap kemiskinan, adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Teori ini diperkenalkan oleh Nurkse, seorang ahli ekonomi yang merintis penelaahan mengenai masalah pembentukan modal di negara berkembang.

*World Bank* (2002) mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi

di daerah yang bersangkutan. Indikator pembangunan infrastruktur yang penting adalah saluran irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama transportasi. Indikator lain dari karakteristik faktor komunitas adalah akses yang sama terhadap usaha atau pekerjaan seperti keberadaan lembaga keuangan dan industry.

Menurut Jhingan (2000), kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standard hidup yang layak. Seringkali masalah kemiskinan timbul bersama dengan masalah pengangguran. Kedua masalah ini erat kaitannya dengan tinggi rendahnya kualitas Indeks Pembangunan Manusia. Dengan rendahnya kualifikasi pendidikan seseorang membuat dirinya terbatas untuk mencari lapangan kerja. Berangkat dari realita empiris tersebut, maka salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia. Adapun indikator Indeks Pembangunan Manusia yaitu Tingkat Pendidikan, Kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan Angka Melek Huruf. Penanggulangan kemiskinan menjadi penting karena jika tidak diatasi segera mungkin maka kemiskinan akan berdampak pada level yang lebih jauh seperti kualitas kehidupan manusia dan kesehatan (Groce, 2011).

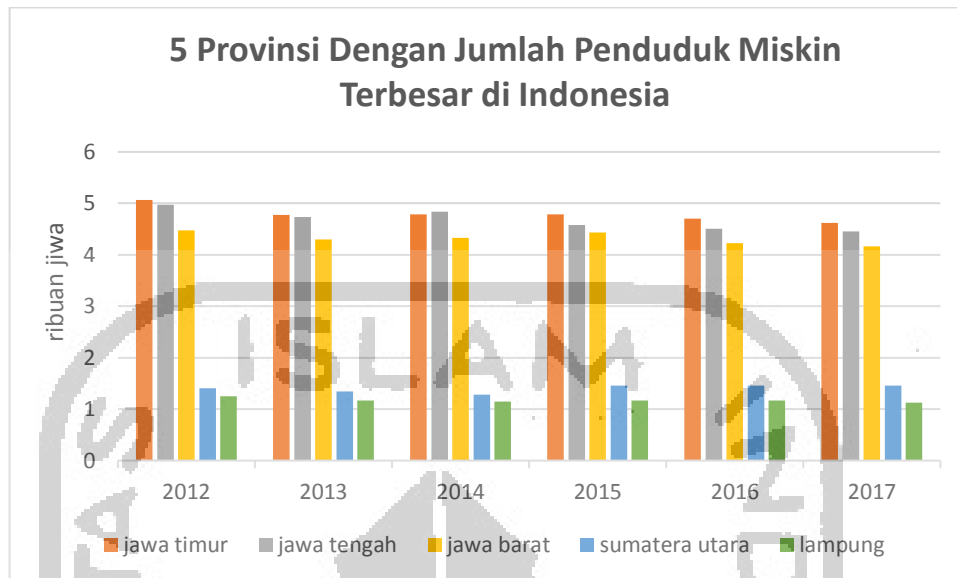
**Tabel 1.1**

**Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK MISKIN</b>	<b>PRESENTASE PENDUDUK MISKIN</b>
<b>2012</b>	<b>29.132.40</b>	<b>23.62</b>
<b>2013</b>	<b>28.066.60</b>	<b>22.84</b>
<b>2014</b>	<b>28.280.01</b>	<b>22.21</b>
<b>2015</b>	<b>28.592.79</b>	<b>22.35</b>
<b>2016</b>	<b>28.005.39</b>	<b>21.56</b>
<b>2017</b>	<b>27.771.22</b>	<b>20.76</b>

Sumber *Badan Pusat Statistik (BPS)*

Pada Tabel 1.1 bisa kita lihat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2012, akan tetapi pada tahun 2013 penduduk miskin berkurang sangat pesat dari 29.132.40 menjadi 28.066.60. Tetapi pada tahun berikutnya yaitu 2014 mengalami kenaikan kembali yang bisa kita golongan mengalami sedikit kenaikan, Lalu bisa kita simpulkan bahwasannya jumlah kemiskinan di Indonesia tergolong fluktuatif yaitu mengalami kenaikan dan penurunan di tahun-tahun berikutnya.



Sumber *Badan Pusat Statistik (BPS)*

**Gambar 1.1**

### **5 Provinsi Dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbesar di Indonesia**

Berdasarkan Gambar 1.1 tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia diduduki peringkat pertama oleh provinsi Jawa Timur, lalu disusul oleh Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung dan Provinsi Lainnya. Kemiskinan di Jawa Timur sendiri mengalami tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 5070.98 ribu jiwa dan pada tahun seterusnya bisa dikatakan bahwa Jawa Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi ini pasti terdapat sebab-sebab yang membuat tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan. Salah satunya ialah kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan harapan dan mendapatkan hasil yang sesuai.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keberhasilan bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi



tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya yaitu pertumbuhan tersebut menyebar pada pendapatan, termasuk pada penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin di dapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Siregar, 2008).

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. Nilai PDRB akan menunjukkan tingkat pembangunan masing-masing daerah tersebut, pada tahun 2012-2017 di Pulau Jawa Provinsi Jawa Timur memiliki nilai PDRB yang cukup tinggi. Pada tahun 2012 nilai PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar 1.124.464.64 milyar rupiah dan mengalami kenaikan setiap tahunnya, terakhir pada tahun 2017 nilai PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar 1.482.147.59 milyar rupiah. Nilai PDRB Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi nilai PDRB Jawa Timur nyatanya hal ini belum mampu untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

IPM sendiri memiliki beberapa peranan penting meliputi tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (daya beli) atau pendapatan. Peningkatan pendidikan seseorang sering dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi. Di samping pendidikan, kesehatan juga memiliki peranan terhadap

pertambahan pendapatan. Pengaruh kesehatan terhadap pendapatan diantaranya dengan perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan dan pengembangan potensi diri yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan (Lumbantoruan dan Hidayat, 2014).

**Tabel 1.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia**

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur (%)
2012	66.74
2013	67.55
2014	68.14
2015	68.95
2016	69.74
2017	70.27

*Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2012-2017*

Pada tabel 1.2 faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan ialah indeks pembangunan manusia. Pada Tabel menunjukkan bahwa Indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Timur naik secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Timur sebesar 66.74% dan 70.27% terjadi pada 2017 tahun kemarin. Pemerintah dalam hal ini menunjukkan sudah bekerja dengan maksimal sehingga bisa mencapai hasil seperti sekarang ini.



**Gambar 1.2**  
**Tingkat Pengangguran (%)**

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa Tingkat pengangguran diatas menunjukkan pengangguran tertinggi di Provinsi Jawa Timur terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4.47% dan pengangguran terendah terjadi pada tahun 2017 kemarin. Pengangguran pada tahun 2015 lalu dikarnakan adanya dampak krisis global yang juga sangat berpengaruh terhadap provinsi Jawa Timur.

Keadaan perekonomian dunia dan Indonesia serta kondisi dunia usaha dan pasar kerja tersebut jelas tergambar dalam keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur yang terefleksi dari hasil pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 yang lalu. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2014 sebelumnya sempat mengalami penurunan di banding periode sebelumnya hingga hanya 20,15 juta orang, namun pada Agustus 2015 kembali menjadi 20,27 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi angkatan kerja, telah terjadi penambahan atau peningkatan sekitar 125 juta orang. Dari sisi penyerapan angkatan kerja pun, pada Agustus 2014 tercatat adanya

tambahan penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 19,37 juta orang atau tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor/lapangan pekerjaan bertambah sebanyak 61 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2014. Tentunya hal ini memberikan gambaran yang positif tentang adanya geliat investasi di Jawa Timur dengan adanya lahan pekerjaan baru yang tersedia.

Namun demikian, tingginya penambahan angkatan kerja pada Agustus 2015 baik mereka yang benar-benar baru terjun ke pasar kerja maupun mereka yang memutuskan untuk beralih pekerjaan dan keluar dari pekerjaan lamanya ternyata tidak seiring dengan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi inilah yang mendorong semakin bertambahnya angkatan kerja yang terkategori sebagai penganggur. Pada Agustus 2015, tercatat bahwa terjadi penambahan jumlah penganggur di Jawa Timur sebanyak 63 ribu orang dibanding periode yang sama pada tahun 2014 menjadi 906 ribu orang. Selain hal di atas, penyebab lain bertambahnya tingkat pengangguran di Jawa Timur dapat disebabkan karena masih adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Jawa Timur yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja di Jawa Timur. *(sumber BPS Jawa Timur).*

Pemerintah dalam hal ini berwenang untuk mengatur roda perekonomian dengan menentukan penerimaan dan pengeluaran belanja pemerintahan. Menurut Wagner dalam Yulianita (2009:7) bahwa pengeluaran pemerintah memegang

peranan penting terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja tak tersangka, serta bunga dan cicilan hutang. Pengeluaran pembangunan terdiri dari pembiayaan dan bantuan proyek.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2010-2017

**Gambar 1.3**

**Belanja Total Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2017**

Berdasarkan gambar 1.3 diatas bisa dilihat bahwa belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya meningkat dan membuahkan hasil bahwa tingkat kemiskinan berarti menurun setiap tahunnya. Dengan adanya masalah masalah seperti diatas maka penulis akan melakukakan penelitian dengan judul “**ANALISIS PENGARUH PDRB, IPM, TINGKAT PENGANGGURAN DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2017**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mencari tahu pokok permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas harga konstan tahun dasar 2010 terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen secara individual maupun simultan :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia ) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Sedangkan Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademisi atau mahasiswa, Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan untuk bahan perbandingan objek penelitian yang sama khususnya tentang Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi pemerintah, Penelitian ini bisa digunakan guna memberikan masukan agar lebih peduli terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Bagi penulis atau peneliti, Penelitian ini sebagai pelaksanaan tugas akhir yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi yang disusun ini terdiri dari 5 bab. Adapun sistematika penulisan

skripsi adalah sebagai berikut :

1. **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan

2. **BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi kajian pustaka dari penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan referensi untuk permasalahan yang

akan diteliti, kerangka pemikiran, hipotesis dan landasan teori yang digunakan sebagai acuan.

### 3. BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan cara pengumpulan data yang dilakukan, definisi operasional, serta metode analisis yang digunakan.

### 4. BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil pengujian atas data penelitian yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta pembahasan yang lebih lanjut dari hasil penelitian dan analisis data.

### 5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan serta implikasi dari jawaban rumusan masalah.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Pustaka

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik dalam kelebihan ataupun kekurangan yang telah ada serta sebagai dasar untuk menyusun kerangka pikir atau arah penelitian ini. Penulis juga mendapatkan referensi dari skripsi dan buku-buku dalam mendapatkan informasi dan landasan teori ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti	Lokasi	Metode	Hasil
1	Ravi Dwi Wijayanto (2010)	Jawa Tengah	Data Panel	PDRB mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan
2	Ketut & Endrayani (2016)	Bali	Data sekunder dan primer	Pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan
3	Kurnia Dwi Rahmawati (2017)	DIY	Data Time Series	Jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran mempunyai pengaruh positif

				terhadap kemiskinan di DIY
4	Irma Setiawati (2017)	Kabupaten Pinrang	Kuantitatif	(PDRB) berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan
5	Nurul Fadlillah , Sukiman dan Agustin Susyatna Dewi (2016)	Jawa tengah	Deskriptif,survey	IPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
6	Dewi Kurniawati Sunusi, Anderson Kumenaung, Debby Rotinsulu (2014)	Sumatra Utara	Kuantitatif	Pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan

## 2.1 Landasan Teori

### 2.2.1 Kemiskinan

Ada banyak definisi dan konsep tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Secara umum, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan.

Badan Pusat Statistik (BPS) 2018. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini

juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Amartya dalam Canning, (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan (Ravi Dwi,2010).

Menurut (*The World Bank*) Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP 1.55 dolar AS per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong 'miskin dari segi pendapatan' dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

## **Ukuran Kemiskinan**

Menurut Rahardjo (2005), secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu “kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif”.

1. Kemiskinan absolut selalu dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai pembelian kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin. Hal ini maksudkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.
2. kemiskinan relatif, yaitu orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum namun tidak selalu berarti tidak miskin. Walaupun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi jika masih jauh lebih rendah dari pemenuhan kebutuhan hidup sederhana, maka orang atau keluarga tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh lingkungan yang bersangkutan.

## **Faktor Penyebab Kemiskinan**

Secara konseptual, Suharto (2009) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh empat faktor, yaitu:

a. Faktor individual

Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dari psikologis si miskin. Masyarakat menjadi miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.

b. Faktor sosial

Kondisi – kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis, yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.

c. Faktor Kultural

Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas.

d. Faktor Struktur

Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak accessible sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

### **Jenis-jenis Kemiskinan**

Menurut Nurhadi (2007), membagi kemiskinan menjadi tiga jenis dengan variasi yang berbeda, yaitu: kemiskinan ekonomi, kemiskinan sosial dan kemiskinan politik.

### 1. Kemiskinan Ekonomi

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam hal ini tidak hanya menyangkut masalah financial saja, tetapi juga meliputi semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

### 2. Kemiskinan Sosial

Secara sosial, kemiskinan menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal.

### 3. Kemiskinan Politik

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuatan dalam pengertian ini mencakup tatanan system politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan resources.

#### **2.2.2 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)**

PDRB merupakan penjumlahan dari semua harga dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun).

Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara penghitungan. Ketiga cara tersebut adalah :

### 1. Cara Pengeluaran

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlah pengeluaran ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut. Menurut cara ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi dan pengeluaran pemerintah serta pendapatan ekspor dikurangi dengan pengeluaran untuk barang-barang impor.

### 2. Cara Produksi atau cara produk netto

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Dalam menghitung pendapatan nasional dengan cara produksi yang dijumlahkan hanyalah nilai produksi tambahan atau value added yang diciptakan.

### 3. Cara Pendapatan

Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional. (Sukirno, 1994: 32).

Adapun manfaat penghitungan nilai PDRB adalah :

1. Mengetahui dan menelaah struktur atau susunan perekonomian. Dari perhitungan PDRB dapat diketahui apakah suatu daerah termasuk daerah industri, pertanian atau jasa dan berapakah besar sumbangan masing-masing sektornya.
2. Membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Oleh karena nilai PDRB dicatat tiap tahun, maka akan di dapat catatan angka dari tahun ke tahun. Dengan

demikian diharapkan dapat diperoleh keterangan kenaikan atau penurunan apakah ada perubahan atau pengurangan kemakmuran material atau tidak.

### **Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap Tingkat Kemiskinan**

Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2007.(dikutip oleh Wishnu Adhi Saputra, 2011).

### **2.2.3 IPM (Indeks Pembangunan Manusia)**

Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia



(masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan.

### **Pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap Tingkat Kemiskinan**

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan

hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

#### **2.2.4 Tingkat Pengangguran**

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Oleh sebab itu, menurut Sadono Sukirno (2000) pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Pengangguran akan selalu muncul dalam suatu perekonomian karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah adanya proses pencarian kerja, yaitu dibutuhkan

waktu untuk mencocokkan para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua adalah adanya kekakuan upah. Kekakuan upah ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya kebijakan upah minimum, daya tawar kolektif dari serikat pekerja, dan upah efisiensi (Mankiw, 2000:123).

### **Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan**

Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Lincoln Arsyad, 1997 dikutip dari (Wishnu Adhi Saputra, 2011) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak

pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin.

#### **2.2.5 Belanja Pemerintah/Pengeluaran Pemerintah**

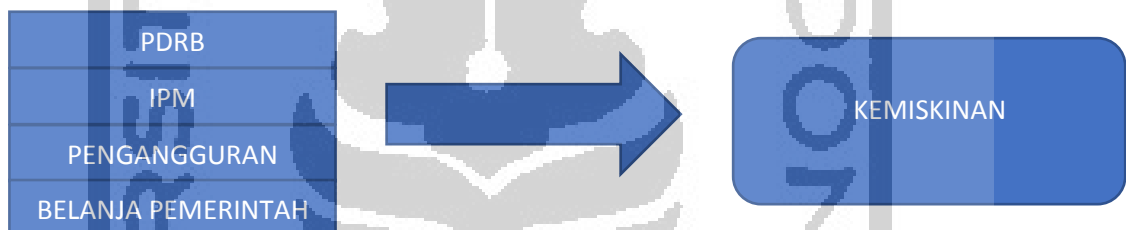
Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan dan memuat keputusan dan pilihan yang dibuat pemerintah guna menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja total pemerintah merupakan penjumlahan seluruh keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat-provinsi-daerah). Pengeluaran pemerintah daerah terlihat dari belanja daerah yang terdapat pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Menurut Bastian (2006) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pelimpahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk periode satu tahun takwim dan condong terhadap tujuan kesejahteraan publik”.

Seberapa besar belanja pemerintah untuk kesejahteraan publik dapat menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kesejahteraan yang meningkat maka pemberantasan kemiskinan disuatu daerah dapat diatasi karena tujuan utama pengeluaran pemerintah salah satunya adalah untuk memakmurkan masyarakatnya.

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan

Kesejahteraan yang didapatkan masyarakat dilihat dari seberapa besar pengeluaran pemerintah yang dilakukan dalam mengalokasikan APBD dalam memenuhi kebutuhan masyarakat disuatu daerah. Bastian (2006), APBD dan pelaksanaan kebijakan pemerintah mempunyai tujuan utama untuk kesejahteraan publik sehingga dapat mengurangi jumlah kemiskinan.

### 2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2

### Kerangka Pemikiran

### 2.3 Hipotesis Penelitian

1. Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan 2010 diduga mempunyai pengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Indeks Pembangunan Manusia diduga mempunyai pengaruh positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Tingkat Pengangguran diduga mempunyai pengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
4. Belanja Pemerintah diduga mempunyai pengaruh positif terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

##### 3.1.1 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat panel, yaitu gabungan dari *time series* dan *cross section*. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan pencatatan dari instansi yang terkait, jurnal maupun dari data penelitian yang lainnya dalam bentuk yang sudah jadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari tahun 2012-2017.

##### 3.1.2 Sumber Data

Data ini memakai 5 (lima) variable yaitu :

1. Tingkat Kemiskinan (Y) : Tingkat Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017 dengan satuan ribu jiwa. Data bersumber dari BPS Jawa Timur.
2. PDRB (X1) : Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017 dengan satuan Milyar Rupiah. Data diperoleh dari BPS Jawa Timur.
3. IPM (X2): Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017 dengan satuan persen. Data di peroleh dari BPS Jawa Timur.

4. Pengangguran (X3) : Pengangguran menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017 dengan satuan persen. Data diperoleh dari BPS Jawa Timur.
5. Belanja Pemerintah (X4) : Belanja Pemerintah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017 dengan satuan milyar. Data diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Jawa Timur.

### **3.1.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode teknik kepustakaan, yaitu dimana data yang diperoleh dan digunakan adalah data sekunder. Dalam pencarian utama data tersebut berfokuskan pada berbagai sumber ataupun instansi yang terkait pada penelitian ini.

### **3.2 Variable Penelitian dan Definisi Oprasional**

Data yang diteliti dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang bersifat menentukan atau mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen.

Dari data sekunder yang ada akan diambil variabel yang mempengaruhi Kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Kemiskinan merupakan variabel dependen yang dilambangkan dengan (K). Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi penyerapan Kemiskinan yaitu PDRB (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah.

### **3.2.1 Variable Dependen**

#### **Tingkat Kemiskinan (TK)**

Tingkat Kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di masing masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Perhitungan dasar garis kemiskinan yang digunakan adalah konsumsi perkapita perbulan setara dengan 2.100 kalori per kapita dalam satu hari (Badan Pusat Statistik) dalam satuan (ribu jiwa).

### **3.2.2 Variabel Independen**

#### **(PDRB) Produk Domestik Regional Bruto**

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Yang dibahas disini adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010 di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2017 dalam satuan (milyar rupiah).

#### **(IPM) Indeks Pembangunan Manusia**

(IPM) Indeks Pembangunan Manusia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur



melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi. Data yang digunakan adalah indeks pembangunan manusia tahun 2005 – 2008 (dalam satuan persen).

### **Tingkat Pengangguran (TP)**

Pengangguran terbuka menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah orang yang masuk angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan pekerjaan bekerja), dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja. Data yang digunakan untuk melihat pengangguran adalah perbandingan antara pengangguran terbuka dengan jumlah penduduk di Jawa Tengah tahun 2005 – 2008 (dalam satuan persen).

### **Belanja Pemerintah (BP)**

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang-barang yang tidak tahan lama, artinya habis dipakai dalam proses produksi. Pengeluaran pemerintah sendiri digunakan untuk membiayai berbagai macam hal yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat (dalam satuan milyar).

## **3.3 Metode Analisis Data**

### **3.3.1 Metode Analisa Data Panel**

Untuk mengetahui pengaruh PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran, dan Belanja Pemerintah digunakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan data panel. Data panel adalah model kombinasi antara *time series* dan *cross section*,

sehingga dalam data panel jumlah observasi merupakan hasil perkalian dari observasi *time series* dan observasi *cross section*. Penggunaan dari metode regresi data panel mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan data *time series* atau *cross section*, yaitu: Data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (Widarjono, 2009).

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran dan Jumlah Penduduk) terhadap variabel terikat (Kemiskinan) di Provinsi Jawa Timur, peneliti menggunakan metode analisis data panel. Alat analisis yang digunakan penulis dalam penelitian adalah Eviews 9. Berikut model persamaan regresi dalam penelitian ini :

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 PENG_{it} + \beta_4 PEM + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

TK = Tingkat Kemiskinan (jiwa)

t = Tahun yang diteliti (2012-2017)

i = Provinsi

$\beta_0$  = Intersept (Konstanta)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi masing-masing variabel

PDRB = PDRB (milyar rupiah)

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (persen)

PENG = Tingkat Pengangguran (persen)

PEM = Belanja Pemerintah (milyar rupiah)

e = Error

### 3.3.2 Pemilihan Metode Estimasi Data Panel

#### 3.3.2.1 Common Effect Model (CEM)

Model *Common Effect* merupakan model yang paling sederhana dalam mengestimasi model regresi data panel yaitu dengan mengkombinasikan data *time series* dengan *cross section*, selanjutnya digunakan estimasi menggunakan OLS (Ordinary Least Square). Dimana dalam metode ini hanya menggabungkan data tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu. Model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_{PDR}Bit + \beta_{IP}Mit + \beta_{PENG}it + \beta_{PE}Mit + \epsilon_{it}$$

#### 3.3.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa obyek observasi maupun koefisien regresi (*slope*) tetap besar dari waktu ke waktu. Dalam asumsi model *fixed effect* menjelaskan asumsi *slope* konstan tetapi intersep bervariasi antar unit dan asumsi *slope* konstan tetapi intersep bervariasi antar individu atau unit dan antar periode waktu. Dalam estimasi model *fixed effect* dapat dilakukan dengan menggunakan dummy sesuai dengan definisi dan kriteria masing-masing asumsi. Model estimasi ini sering disebut dengan *Least Squares Dummy Variables (LSDV)*. Persamaan model ini adalah sebagai berikut :

$$TK_{it} = \beta_0i + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \epsilon_{it}$$

dimana: i = banyaknya observasi(1,2,...n)

t = banyaknya waktu(1,2,...t)

n = banyaknya variabel bebas

n x t= banyaknya data panel

$\varepsilon$  = residual

Pendekatan *Fixed Effect* ini mempunyai kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian model dengan keadaan sesungguhnya. Sehingga diperlukan model yang dapat menunjukkan perbedaan antar intersep yang mengasumsikan adanya perbedaan baik antar objek maupun antar waktu (Sriyana, 2014).

### 3.3.2.3 Random Effect Model (REM)

Pendekatan ini diartikan dengan memilih estimasi data panel dengan residual yang mempunyai kemungkinan saling berhubungan antara waktu dan individu, menggunakan asumsi bahwa setiap intersep berbeda, namun mengindikasikan intersep dalam variabel random. Persamaan untuk model Random Effect sebagai berikut :

$$TK_{it} = \beta_0i + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$$

dimana:

m = banyaknya observasi (1,2,...m)

t = banyaknya waktu (1,2,...t)

n = banyaknya variabel bebas

n x t= banyaknya data panel

$\varepsilon$  = residual

### 3.3.3 Uji Pemilihan Model

#### 3.3.3.1 Uji Chow

Pengujian yang dilakukan untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan *common effect* atau *fixed effect* dapat dilakukan dengan Uji Chow.

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

$H_0$  : *Common Effect Model*

$H_a$  : *Fixed Effect Model*

Dengan asumsi sebagai berikut:

1.  $H_0$  diterima jika, probabilitas  $> \alpha$  (alpha) yang artinya model yang baik untuk digunakan adalah *Common Effect Model*.
2.  $H_a$  diterima jika, probabilitas  $< \alpha$  (alpha) yang artinya model yang baik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

#### 3.3.3.2 Uji Hausman

Pengujian untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan *random effect* atau *fixed effect* dapat dilakukan dengan uji hausman. Hipotesis yang digunakan dalam hausman test adalah sebagai berikut :

$H_0$  : *Random Effect Model*

$H_a$  : *Fixed Effect Model*

Dengan asumsi sebagai berikut:

1.  $H_0$  diterima jika, probabilitas  $> \alpha$  (alpha) yang artinya model yang baik untuk digunakan adalah *Random Effect Model*.
2.  $H_a$  diterima jika, probabilitas  $< \alpha$  (alpha) yang artinya model yang baik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

### 3.3.4 Uji Statistik

Uji Statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t), Uji Koefisien Regresi secara bersama-sama (Uji F), dan Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>).

#### 3.3.4.1 Uji t

Koefisien regresi secara parsial atau biasa disebut dengan uji t yaitu digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probability dengan taraf signifikansinya. Adapun hipotesis secara individunya, yaitu:

a. Variabel Produk Domestik Regional Bruto

H<sub>0</sub>:  $\beta_1 \geq 0$ , artinya variabel Produk Domestik Regional Bruto tidak memengaruhi variabel Y (Kemiskinan).

H<sub>1</sub>:  $\beta_1 < 0$ , maka terdapat variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan).

b. Variabel Indeks Pembangunan Manusia

H<sub>0</sub>:  $\beta_2 \geq 0$ , artinya variabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota tidak memengaruhi variabel Y (Kemiskinan).

H<sub>1</sub>:  $\beta_2 < 0$ , maka terdapat variabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan).

c. Variabel Tingkat Pengangguran

H0:  $\beta_3 \geq 0$ , artinya variabel Tingkat Pengangguran tidak memengaruhi variabel Y (Kemiskinan).

H1:  $\beta_3 < 0$ , maka terdapat variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan).

d. Variabel Belanja Pemerintah

H0:  $\beta_4 \geq 0$ , artinya variabel Belanja Pemerintah tidak memengaruhi variabel Y (Kemiskinan).

H1:  $\beta_4 < 0$ , maka terdapat variabel Belanja Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan).

### 3.3.4.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji F disebut juga uji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak disini berarti bahwa model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis uji F yaitu :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$$

Jika  $F_{hitung} > F_{kritis}$  maka menolak  $H_0$ , artinya variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi variabel dependen. Jika  $F_{hitung} < F_{kritis}$  maka menerima  $H_0$  yang artinya secara bersama – sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

### 3.3.4.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model menjelaskan variabel terikat yang dihitung. Nilai  $R^2$  yang kecil/ mendekati nol, berarti kemampuan variabel variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas atau kecil. Nilai  $R^2$  yang besar mendekati 1, berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.





## BAB IV

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan data sekunder Data Kemiskinan, PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah diperoleh dari publikasi *Badan Pusat Statistik (BPS)* dan *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan* provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan untuk penelitian ini meliputi data selama 6 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai 2017 sedangkan data *cross section* dalam penelitian ini meliputi dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Kemiskinan sedangkan variabel bebas pada penelitian ini adalah PDRB, IPM, Pengangguran dan Belanja Pemerintah. Berikut deskripsi data variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif Variable Penelitian

Variable	Kemiskinan	PDRB	IPM	Tingkat Pengangguran	Belanja Pemerintah
Mean	126,37	1.0884,81	91,32	4,21	1.832,54
Maximum	293,74	76,33	1,824	8	7,912
Minimum	7,24	139,94	2,37	0,85	435
Std.Dev.	76,29	1.9301,12	8,05	1,63	1.036,58
Observations	228	228	288	288	288

## 4.2 Hasil Analisis Data

### 4.2.1 Uji Signifikansi *Common Effect* (CEM)

Hasil dari pengujian regresi data panel dengan model *Common Effect* menggunakan program Eviews 9, didapatkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Hasil Regresi *Common Effect Model* (CEM)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	754.3986	40.69280	18.53887	0.0000
PDRB	-5.97E-05	9.79E-05	-0.610352	0.5423
IPM	-10.75784	0.612479	-17.56442	0.0000
PENGG	7.359052	1.975652	3.724873	0.0002
PEM	0.044946	0.004598	9.775924	0.0000
R-squared	0.731822	Mean dependent var		125.5728
Adjusted R-squared	0.726989	S.D. dependent var		76.41711
S.E. of regression	39.92825	Akaike info criterion		10.23383
Sum squared resid	353926.9	Schwarz criterion		10.30926
Log likelihood	-1156.539	Hannan-Quinn criter.		10.26427
F-statistic	151.4517	Durbin-Watson stat		0.188273
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber data diolah Eviews 9

### 4.4.2 Uji Signifikansi *Fixed Effect* (FEM)

Hasil dari pengujian regresi data panel dengan model *Fixed Effect* menggunakan program Eviews 9, didapatkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Hasil Regresi *Fixed Effect Model* (FEM)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	259.1094	26.47767	9.785959	0.0000
PDRB	6.16E-05	5.48E-05	1.123785	0.2626
IPM	-1.886507	0.399422	-4.723089	0.0000
PENGG	0.062581	0.316807	0.197536	0.8436
PEM	-0.003321	0.001147	-2.894298	0.0043

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.997767	Mean dependent var	125.5728
Adjusted R-squared	0.997272	S.D. dependent var	76.41711
S.E. of regression	3.991495	Akaike info criterion	5.771659
Sum squared resid	2947.427	Schwarz criterion	6.405350
Log likelihood	-613.0833	Hannan-Quinn criter.	6.027362
F-statistic	2015.875	Durbin-Watson stat	1.168881
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber data diolah Eviews 9

#### 4.4.3 Uji Signifikasi *Random Effect Model* (REM)

Hasil dari pengujian regresi data panel dengan model *Random Effect* menggunakan program Eviews, didapatkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Regresi *Random Effect Model* (REM)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	338.0117	25.09955	13.46684	0.0000
PDRB	9.78E-05	5.01E-05	1.950171	0.0524
IPM	-3.094653	0.369808	-8.368271	0.0000
PENGG	-0.178250	0.314579	-0.566631	0.5715
PEM	-0.000904	0.001073	-0.842073	0.4007
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			34.60724	0.9869
Idiosyncratic random			3.991495	0.0131
Weighted Statistics				
R-squared	0.352476	Mean dependent var	5.929758	
Adjusted R-squared	0.340809	S.D. dependent var	6.047782	
S.E. of regression	4.900001	Sum squared resid	5330.223	
F-statistic	30.21107	Durbin-Watson stat	0.662657	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber data diolah Eviews 9

Hasil Regresi *Random Effect Model* (REM) didapatkan nilai koefisien pada (PDRB) = 9.78E-05 (IPM) = -3.094653 (PENG) = -0.178250 dan (PEM) = -0.000904.

### 4.3 Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model dalam sebuah penelitian dilakukan berdasarkan pengujian statistik. Setelah mendapatkan hasil estimasi dari *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*, pengujian yang dilakukan antara lain uji chow untuk memilih model terbaik antara *common effect* model atau *fixed effect* model dan uji hausman untuk memilih model terbaik antara *fixed effect* model dan *random effect* model sehingga menghasilkan model pendekatan yang terbaik. Berikut hasil dari uji pemilihan model :

#### 4.3.1 Likelihood Ration ( Uji Chow)

Hasil dari pengujian menggunakan Uji *Redudant Fixed Effects-Likelihood Ratio* sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	595.399827	(37,185)	0.0000
Cross-section Chi-square	1086.911843	37	0.0000

Sumber data diolah Eviews 9

Dari hasil pengujian diatas pada tabel 4.5 diperoleh nilai probabilitas *Cross Section F* sebesar 0,0000 dengan demikian nilai *p-value* lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), sehingga dapat disimpulkan dari uji chow adalah menolak  $H_0$ , sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

#### 4.3.2 Uji Hausman

Hasil dari pengujian menggunakan Uji *Correlated Random Effect – Hausman Test* sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	115.871225	4	0.0000

Sumber data diolah Eviews 9

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.6 diperoleh nilai statistic pada uji hausman memiliki probabilitas 0.0000 dengan nilai *p-value* lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), berarti dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, dengan ini model *Random Effect Model* (REM) lebih baik digunakan daripada *fixed Effect Model* (FEM).

#### 4.4. Model Terbaik

Setelah dilakukan uji model dengan menggunakan 3 metode yaitu, model *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* telah didapatkan model yang terbaik yaitu dengan *Fixed Effect Model*

Berikut hasil dari uji regresi Uji Chow dengan Uji Hausman, model terbaik yang didapatkan adalah dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model*.

**Tabel 4.7**

#### Hasil Regresi FIX EFFECT MODEL (FEM)

Dependent Variable: KEM  
Method: Panel Least Squares  
Date: 06/21/19 Time: 13:03  
Sample: 2012 2017  
Periods included: 6  
Cross-sections included: 38  
Total panel (unbalanced) observations: 227

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	259.1094	26.47767	9.785959	0.0000
PDRB	6.16E-05	5.48E-05	1.123785	0.2626
IPM	-1.886507	0.399422	-4.723089	0.0000

PENGG	0.062581	0.316807	0.197536	0.8436
PEM	-0.003321	0.001147	-2.894298	0.0043

#### Effects Specification

##### Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.997767	Mean dependent var	125.5728
Adjusted R-squared	0.997272	S.D. dependent var	76.41711
S.E. of regression	3.991495	Akaike info criterion	5.771659
Sum squared resid	2947.427	Schwarz criterion	6.405350
Log likelihood	-613.0833	Hannan-Quinn criter.	6.027362
F-statistic	2015.875	Durbin-Watson stat	1.168881
Prob(F-statistic)	0.000000		

\*) dengan  $\alpha$  5%

Sumber data Eviews 9

Berdasarkan hasil regresi Fixed Effect Model dapat dituliskan dengan model regresi dan persamaan sebagai berikut :

$$KEM_{it} = \alpha_i + \beta_1 PDRB + \beta_2 IPM + \beta_3 PENG + \beta_4 PEM + \epsilon_{it}$$

$$KEM = 259.1094 + 6.16E - 1.886507 + 0.062581 - 0.003321$$

Dimana KEM = Kemiskinan, PDRB = Produk Domestik Regional Bruto, IPM = Indeks Pembangunan Manusia, PENG = Tingkat Pengangguran dan PEM = Belanja Pemerintah.

#### 4.5 Hasil Analisa Data

##### 4.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model* diketahui  $R^2$  sebesar 0.997767 menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, IPM, Pengangguran, dan Belanja Pemerintah sebesar 99% dan 1% di jelaskan menggunakan variable lainnya di luar model.

#### 4.5.2 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Dari hasil estimasi yang telah dilakukan diatas didapatkan nilai Prob (F-statistic)  $0.000000 < \alpha 5\%$  maka hasil tersebut signifikan yang berarti terdapat pengaruh antara variabel PDRB, IPM, PENGG, dan PEM terhadap Tingkat kemiskinan.

#### 4.5.3 Uji Statistik T

**Tabel 4.8**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Variable	Koefisien	Probabilitas	Keterangan
X1	6.16E-05	0.2626	Tidak Signifikan
X2	-1.886507	0.0000	Signifikan
X3	0.062581	0.8436	Tidak Signifikan
X4	-0.003321	0.0043	Signifikan

Hasil Regresi pada tabel 4.8 menyatakan bahwa PDRB (X1) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas  $0.2626 > \alpha 5\%$ .

Hasil Regresi pada tabel 4.8 menyatakan bahwa IPM (X2) diperoleh probabilitas IPM (X2) sebesar  $0,0000 < \alpha 5\%$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel IPM (X2) signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil Regresi pada tabel 4.8 menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran (X3) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas  $0.8436 > \alpha 5\%$ .

Hasil Regresi pada tabel 4.8 menyatakan bahwa Belanja Pemerintah (X4) diperoleh probabilitas Belanja Pemerintah (X4) sebesar  $0.0043 < \alpha 5\%$ , maka dapat

disimpulkan bahwa variabel Belanja Pemerintah (X4) signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

#### 4.5.4 Analisis Ekonomi

##### A. Analisa Intersep

Pada tabel 4.9 menunjukkan Konstanta masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2017.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Cross Section Effect**

No	Kabupaten	Effect	C	Konstanta
1	Kabupaten Pacitan	-4.372.899	2.591.094	-1.781.805
2	Kab. Ponorogo	-2.460.844	2.591.094	130.250
3	Kab. Trenggalek	-3.719.324	2.591.094	-1.128.230
4	Kab. Tulungagung	-3.312.518	2.591.094	-721.424
5	Kab. Blitar	-9.996.093	2.591.094	-7.404.999
6	Kab. Kediri	7.537.071	2.591.094	10.128.165
7	Kab. Malang	1.586.335	2.591.094	4.177.429
8	Kab. Lumajang	-1.707.416	2.591.094	883.678
9	Kab. Jember	1.379.400	2.591.094	3.970.494
10	Kab. Banyuwangi	2.112.334	2.591.094	4.703.428
11	Kab. Bondowoso	-2.009.716	2.591.094	581.378
12	Kab. Situbondo	-4.420.783	2.591.094	-1.829.689
13	Kab. Probolinggo	1.038.946	2.591.094	3.630.040
14	Kab. Pasuruan	3.658.305	2.591.094	6.249.399
15	Kab. Sidoarjo	2.422.064	2.591.094	5.013.158
16	Kab. Mojokerto	-8.784.590	2.591.094	-6.193.496
17	Kab. Jombang	1.310.783	2.591.094	3.901.877
18	Kab. Nganjuk	1.053.385	2.591.094	3.644.479
19	Kab. Madiun	-3.998.721	2.591.094	-1.407.627
20	Kab. Magetan	-5.003.758	2.591.094	-2.412.664
21	Kab. Ngawi	1.063.228	2.591.094	3.654.322
22	Kab. Bojonegoro	6.094.190	2.591.094	8.685.284
23	Kab. Tuban	6.464.136	2.591.094	9.055.230
24	Kab. Lamongan	6.202.171	2.591.094	8.793.265
25	Kab. Gresik	5.094.733	2.591.094	7.685.827



26	Kab. Bangkalan	7.526.818	2.591.094	10.117.912
27	Kab. Sampang	9.294.839	2.591.094	11.885.933
28	Kab. Pamekasan	1.238.793	2.591.094	3.829.887
29	Kab. Sumenep	8.262.522	2.591.094	10.853.616
30	Kota Kediri	-9.524.542	2.591.094	-6.933.448
31	Kota Blitar	-1.047.879	2.591.094	1.543.215
32	Kota Malang	-6.737.475	2.591.094	-4.146.381
33	Kota Probolinggo	-1.043.215	2.591.094	1.547.879
34	Kota Pasuruan	-1.043.311	2.591.094	1.547.783
35	Kota Mojokerto	-1.073.109	2.591.094	1.517.985
36	Kota Madiun	-9.913.600	2.591.094	-7.322.506
37	Kota Surabaya	5.630.819	2.591.094	8.221.913
38	Kota Batu	-1.118.972	2.591.094	1.472.122

Dapat diketahui dari Tabel 4.9 bahwa<sup>1</sup> wilayah Provinsi Jawa Timur menunjukkan kondisi tingkat kemiskinan berbeda-beda di setiap kabupaten/kota. Dari tabel 4.9 diatas dapat dilihat dari masing-masing konstanta diketahui bahwa tingkat kemiskinan paling tinggi ada di Kabupaten Sampang sebesar 11.885.933 hal ini dikarnakan masih banyaknya masyarakat yang putus sekolah dan rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur karena masih banyaknya jalan yang rusak parah, kemudian tingkat kemiskinan terendah adalah Kabupaten Blitar sebesar -7.404.999.

## 4.6 Pembahasan

### 4.6.1 Analisis pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan

Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan para ahli dalam teori bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan melalui sektor industri pertanian sebagai sektor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Menurut analisa saya,yang terjadi karena PDRB di Jawa Timur tertinggi didapatkan dari sektor industri, Tetapi para pekerja di sektor industri dituntut untuk memiliki kulaifikasi pendidikan yang tinggi, Sedangkan

rata-rata penduduk di Jawa timur masih meliki tingkat pendidikan yang cukup rendah. Hal ini kemungkinan yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak berparuh terhadap kemiskinan dikarenakan banyaknya masyarakat miskin yang tidak terserap karna tidak sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan perusahaan pada sektor industri. Penelitian yang saya lakukan memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari yang berjudul pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2012-2015.

#### **4.6.2 Analisis pengaruh IPM terhadap Tingkat kemiskinan**

Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan dengan ditunjukkan koefisien sebesar -3.157656 yang berarti bahwa ketika IPM naik 1% maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 3.157656 ribu jiwa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Arsyad (2010) salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan pembangunan sumber daya manusia. Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. IPM merupakan ukuran untuk pembangunan manusia secara relatif, apabila IPM meningkat berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dengan demikian kemiskinan menurun.

#### **4.6.3 Analisis pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat**

##### **Kemiskinan**

Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan bahwa tidak semua orang menganggur itu selalu miskin. Karena seperti

halnya penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka ada beberapa macam penganggur, yaitu mereka yang mencari kerja, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Diantara empat kategori pengangguran terbuka diatas bahwa sebagian diantaranya ada yang masuk dalam sektor informal, dan ada juga yang mempunyai pekerjaan dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Selain itu pastilah juga ada yang berusaha atau mempersiapkan usaha sendiri, ada juga yang sedang menunggu mulainya bekerja, ada juga yang mempunyai pekerjaan paruh waktu (PartTime) namun dengan penghasilan melebihi orang bekerja secara normal, dan yang mana semua golongan tersebut masuk dalam kategori pengangguran terbuka. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Rusdarti (2013) yang menyimpulkan Pengangguran tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

#### **4.6.4 Analisis pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan**

Belanja Pemerintah mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien sebesar  $-0.003321$  maka dapat diartikan ketika Belanja Pemerintah naik sebesar 1 milyar maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar  $0.003321$  ribu jiwa. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Widodo, Waridin dan Maria (2011), yang mengungkapkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan digunakan untuk pembangunan masyarakat sehingga dapat menekan angka kemiskinan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab iv, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2017, yang artinya semakin tinggi PDRB tidak mempengaruhi menurunnya tingkat kemiskinan di kabupaten Provinsi Jawa Timur.
2. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan angka negatif dan signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2017. Yang dimana dimaksudkan bahwa ketika IPM naik maka kemiskinan akan menurun.
3. Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2017. Yang dimana dimaksudkan ketika tingkat pengangguran naik maka tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
4. Belanja pemerintah menunjuka angka negatif dan signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2107.

Yang artinya ketika Belanja pemerintah naik maka tingkat kemiskinan akan turun.

## 5.2.Saran

1. Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sehingga diharapkan Pemerintah daerah diharapkan melakukan percepatan peningkatan pendidikan.
2. IPM berdasarkan hasil penelitian berpengaruh terhadap kemiskinan, dengan hasil tersebut menunjukan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan diharapkan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk bisa lebih baik dalam membuat program-program bagi masyarakat agar bisa meningkatkan IPM.
3. Pengangguran berdasarkan hasil penelitian tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, Pemerintah di Provinsi Jawa Timur sebaiknya melakukan pelatihan – pelatihan bertema wirausaha kepada masyarakat agar dengan pelatihan yang diterima tersebut masyarakat bisa lebih berani untuk membuka lapangan usaha baru dan bukan mencari pekerjaan.
4. Belanja pemerintah berdasarkan hasil penelitian terhadap kemiskinan, diharapkan belanja pemerintah bisa dialokasikan dengan baik, dan bisa ditargetkan secara tepat agar mensejahterakan masyarakat dan dapat mengurangi kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Azizah, A. N., (2016). *Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Pendekatan Konsep Untuk Kelas IX Semester II*, Tesis, Universitas Negeri Medan: Medan.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2017. *Indonesia Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2017. *Jawa Timur Dalam Angka*.
- Bank Dunia. (2006). *Era baru dalam pengetasan kemiskinan di Indonesia*. : Gradasi Aksara.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2012-2017. *Jawa Timur*.
- Hambarsari, D. K. & Inggit, Kunto. (2016). "Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan penduduk dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur tahun 2004-2014". Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Irhamni (2017). "Pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1986-2015". Program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lumbantoruan. Pratiwi, E. & Hidayat, P. (2014). "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi Di Indonesia". (Metode Kointegrasi). *Ekonomi Dan Keuangan*. Universitas Sumatera Utara, Vol.2, No.2. Medan.
- Mahsunah, Darrotul. (2013). "Analisis pengaruh jumlah penduduk, penduduk dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur". Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya.
- Mankiw, G. N. (2000). *Pengantar Ekonomi ; Edisi ke-4*. Erlangga: Jakarta.
- Mustika, Candra. (2011). "Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008". *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol. 1 No. 4 Bulan Oktober 2011.
- Nurhadi. (2007). *Mengembangkan Jaminan Sosial dan Mengentaskan Kemiskinan*. Cetakan pertama, Yogyakarta: Media Wacana.

- Permana, Anggit Yoga dan Arianti, Fitri. (2012). "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009". Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahardjo. (2005). "Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah", Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmawati, D. K. (2017). "Analisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di DIY tahun 2006-2013". Program studi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rejekiingsih, T. W. (2011). "Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural". Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Rusdarti, L. K. (2013). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah". Jurnal Economics.
- Setiawati, Irma. (2017). "Pengaruh produk domestik regional bruto, pendidikan dan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinang". IESP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alaudin, Makasar.
- Siregar, Hermanto. & Wahyuniarti, Dwi. (2008). "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin".
- Sitepu, Rasidin K. dan Bonar M. Sinaga, (2004). "Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia". Pendekatan Model Computable General Equilibrium.
- Suharto, Edi. (2009). "Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia", Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2000). "Makroekonomi Modern". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2004). "Makroekonomi Teori Pengantar". Edisi Ketiga. Penerbit Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sunusi, D. K., Kumenaung, A. & Rotinsulu, D. (2014). "Analisis pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2001-2010". Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Suryono, W. B. (2010). "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah". Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.

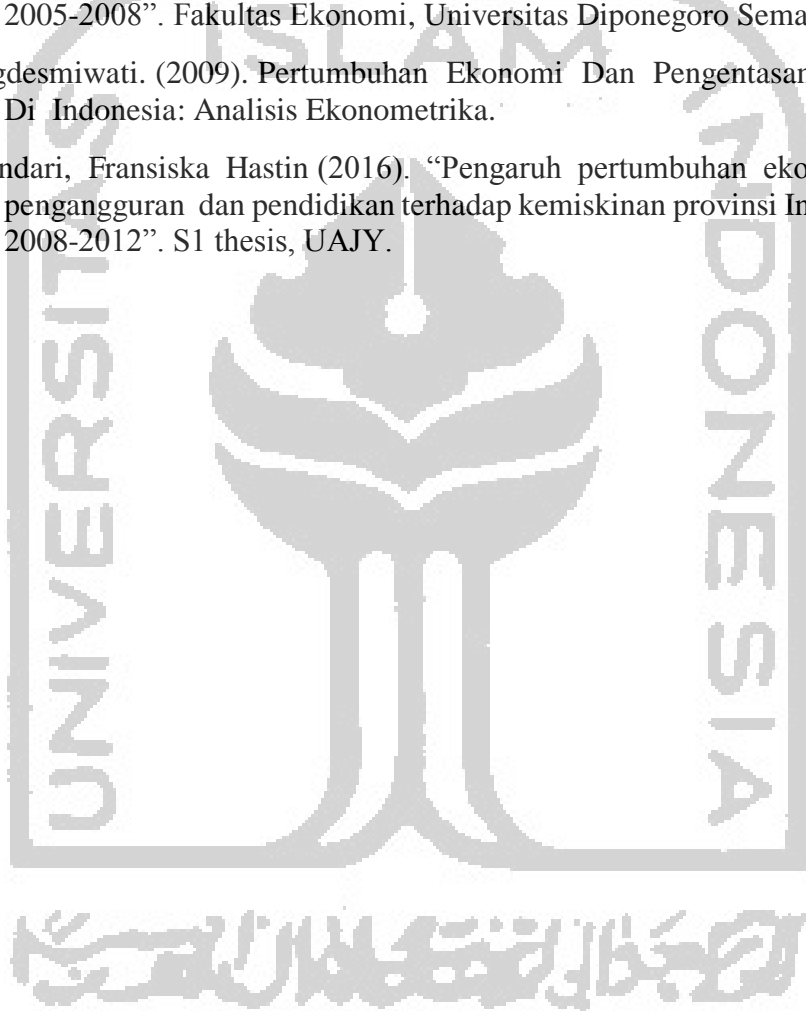
Susanti, Sussy. (2013). "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel". STIE Ekuitas.

Tulus H. Tambunan, (2001). *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Wijayanto, Ravi Dwi. (2010). "Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2005-2008". Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.

Wongdesmiwati. (2009). *Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika*.

Wulandari, Fransiska Hastin (2016). "Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan provinsi Indonesia tahun 2008-2012". S1 thesis, UAJY.







## LAMPIRAN

### 1. Lampiran Data

Kabupaten	Tahun	Kemiskinan (Ribu Jiwa)	PDRB (Milyar)	IPM (%)	Belanja Pemerintah (Milyar)	Tingkat Pengangguran (%)
Kabupaten Pacitan	2012	9.450	7705	62.94	964	1.02
Kabupaten Pacitan	2013	9.170	8157.60	63.38	1036	0.99
Kabupaten Pacitan	2014	8.890	8582.20	63.81	1202	1.08
Kabupaten Pacitan	2015	9.208	9019.54	64.92	1408	0.97
Kabupaten Pacitan	2016	8.553	9489.69	65.74	1644	0.97
Kabupaten Pacitan	2017	8.526	9962.05	66.51	1965	0.85
Kabupaten Ponorogo	2012	10.140	10038.40	66.16	1265	3.14
Kabupaten Ponorogo	2013	10.300	10554.50	67.03	1396	3.25
Kabupaten Ponorogo	2014	9.990	11104.50	67.40	1626	3.66
Kabupaten Ponorogo	2015	10.322	11687.87	68.16	1894	3.68
Kabupaten Ponorogo	2016	10.206	12305.65	68.93	2100	3.68
Kabupaten Ponorogo	2017	9.903	12933.4	69.26	2635	3.76
Kabupaten Trenggalek	2012	9.690	8959.50	65.01	1044	2.98
Kabupaten Trenggalek	2013	9.280	9496.70	65.76	1164	4.04
Kabupaten Trenggalek	2014	9.000	9998.50	66.16	1372	4.20
Kabupaten Trenggalek	2015	9.217	10501.58	67.25	1552	2.46
Kabupaten Trenggalek	2016	9.149	11026.55	67.78	1514	2.46
Kabupaten Trenggalek	2017	8.977	11579.9	68.10	1987	3.48
Kabupaten Tulungagung	2012	9.460	18999	68.29	1576	3.10
Kabupaten Tulungagung	2013	9.170	20164.30	69.30	1680	2.71
Kabupaten Tulungagung	2014	8.900	21265.20	69.49	2046	2.42
Kabupaten Tulungagung	2015	8.737	22326.62	70.07	2317	3.95
Kabupaten Tulungagung	2016	8.435	23446.44	70.82	2606	3.95
Kabupaten Tulungagung	2017	8.280	24637.4	71.24	3160	2.27
Kabupaten Blitar	2012	12.160	18054.50	66.17	1372	2.82
Kabupaten Blitar	2013	12.030	18967.30	66.49	1637	3.64
Kabupaten Blitar	2014	11.670	19920.20	66.88	1803	3.08
Kabupaten Blitar	2015	11.412	20928.47	68.13	2072	2.79
Kabupaten Blitar	2016	11.351	21991.43	68.88	2368	2.79
Kabupaten Blitar	2017	112,93	23107.5	69.33	2350	2.99
Kabupaten Kediri	2012	20.900	20538.30	67.29	1487	4.08
Kabupaten Kediri	2013	20.270	21733.50	68.01	1595	4.65
Kabupaten Kediri	2014	19.680	22890	68.44	1826	4.91

Kabupaten Kediri	2015	19.938	24007.72	68.91	2274	5.02
Kabupaten Kediri	2016	19.743	25211.90	69.87	2617	5.02
Kabupaten Kediri	2017	19.108	26442.8	70.47	2768	3.18
Kabupaten Malang	2012	27.550	47076	64.71	2221	3.75
Kabupaten Malang	2013	28.860	49571.70	65.20	2440	5.17
Kabupaten Malang	2014	28.030	52550.40	65.59	2864	4.83
Kabupaten Malang	2015	29.287	55317.82	66.63	3538	4.95
Kabupaten Malang	2016	29.374	58247.34	67.51	3543	4.95
Kabupaten Malang	2017	28.396	61408.6	68.47	4117	4.60
Kabupaten Lumajang	2012	12.640	16053.40	61.31	1100	4.60
Kabupaten Lumajang	2013	12.440	16949.60	61.87	1237	2.01
Kabupaten Lumajang	2014	12.070	17851.90	62.33	1472	2.83
Kabupaten Lumajang	2015	11.851	18676.95	63.02	1660	2.60
Kabupaten Lumajang	2016	11.591	19555.17	63.74	1934	2.60
Kabupaten Lumajang	2017	11.265	20542.9	64.23	1998	2.91
Kabupaten Jember	2012	28.000	37262	61.31	2087	3.77
Kabupaten Jember	2013	27.850	39519.20	62.43	2348	3.94
Kabupaten Jember	2014	27.040	41971.70	62.64	2695	4.64
Kabupaten Jember	2015	26.954	44222.56	63.04	3083	4.77
Kabupaten Jember	2016	26.510	46533.56	64.01	2979	4.77
Kabupaten Jember	2017	26.690	48913	64.96	3558	5.16
Kabupaten Banyuwangi	2012	15.720	37235.70	66.12	1682	3.41
Kabupaten Banyuwangi	2013	15.220	39733.60	66.74	1886	4.65
Kabupaten Banyuwangi	2014	14.770	42005.70	67.31	2299	7.17
Kabupaten Banyuwangi	2015	14.600	44529.93	68.08	2741	2.55
Kabupaten Banyuwangi	2016	14.045	46924.58	69	3095	2.55
Kabupaten Banyuwangi	2017	13.854	49480.4	69.64	3104	3.07
Kabupaten Bondowoso	2012	11.850	9583.40	62.24	1074	3.60
Kabupaten Bondowoso	2013	11.530	10140.10	63.21	1266	2.04
Kabupaten Bondowoso	2014	11.190	10652.40	63.43	1471	3.72
Kabupaten Bondowoso	2015	11.372	11179.62	63.95	1776	1.75
Kabupaten Bondowoso	2016	11.463	11735.59	64.52	1992	1.75
Kabupaten Bondowoso	2017	11.166	12325.7	64.75	2209	2.09
Kabupaten Situbondo	2012	9.450	9411.60	62.23	927	3.33
Kabupaten Situbondo	2013	9.030	9993.80	63.43	1150	3.01
Kabupaten Situbondo	2014	8.770	10572.40	63.91	1305	4.15
Kabupaten Situbondo	2015	9.117	11086.48	64.53	1480	3.75
Kabupaten Situbondo	2016	8.968	11640.76	65.08	1659	3.75
Kabupaten Situbondo	2017	8.823	12230.5	65.68	1611	1.49

Kabupaten Probolinggo	2012	24.850	16936.80	61.33	1290	1.92
Kabupaten Probolinggo	2013	23.870	17808.90	62.61	1329	3.3
Kabupaten Probolinggo	2014	23.190	18682.20	63.04	1524	1.47
Kabupaten Probolinggo	2015	23.696	19570.99	63.83	1879	2.51
Kabupaten Probolinggo	2016	24.047	20504.09	64.12	2038	2.51
Kabupaten Probolinggo	2017	23.672	21418.2	64.28	2269	2.89
Kabupaten Pasuruan	2012	17.910	70167.10	62.31	1563	6.38
Kabupaten Pasuruan	2013	17.570	75044	63.74	1739	4.34
Kabupaten Pasuruan	2014	17.070	80105.40	64.35	2000	4.43
Kabupaten Pasuruan	2015	16.919	84415.72	65.04	2443	6.41
Kabupaten Pasuruan	2016	16.806	89011.18	65.71	3159	6.41
Kabupaten Pasuruan	2017	16.564	94089.7	66.69	3100	4.97
Kabupaten Sidoarjo	2012	13.050	93543.90	75.14	2238	5.37
Kabupaten Sidoarjo	2013	13.820	99992.50	76.39	2569	4.12
Kabupaten Sidoarjo	2014	13.380	106434.30	76.78	3891	3.88
Kabupaten Sidoarjo	2015	13.613	112012.86	77.43	3662	6.30
Kabupaten Sidoarjo	2016	13.679	118179.19	78.17	3651	6.30
Kabupaten Sidoarjo	2017	13.542	124899.5	78.70	1662	4.97
Kabupaten Mojokerto	2012	11.270	39047.30	69.17	1253	3.35
Kabupaten Mojokerto	2013	11.660	41608.40	69.84	1432	3.16
Kabupaten Mojokerto	2014	11.330	44292	70.22	1714	3.81
Kabupaten Mojokerto	2015	11.386	46792.33	70.85	2179	4.05
Kabupaten Mojokerto	2016	11.538	49360.59	71.38	2259	4.05
Kabupaten Mojokerto	2017	11.179	52191.4	72.36	2326	5
Kabupaten Jombang	2012	14.960	19514.80	67.82	1363	6.72
Kabupaten Jombang	2013	13.750	20672.30	68.63	1559	5.59
Kabupaten Jombang	2014	13.350	21793.20	69.07	1780	4.39
Kabupaten Jombang	2015	13.375	22960.25	69.59	2164	6.11
Kabupaten Jombang	2016	13.332	24199.07	70.03	2364	6.11
Kabupaten Jombang	2017	13.116	25497	70.88	2836	5.14
Kabupaten Nganjuk	2012	13.610	12767	68.07	1348	4.09
Kabupaten Nganjuk	2013	14.080	13456	68.98	1486	4.73
Kabupaten Nganjuk	2014	13.650	14142.90	69.59	1736	3.93
Kabupaten Nganjuk	2015	13.204	14875.35	69.90	1983	2.10
Kabupaten Nganjuk	2016	12.790	15661.81	70.50	2201	2.10
Kabupaten Nganjuk	2017	12.552	16485.6	70.69	2566	3.23
Kabupaten Madiun	2012	9.180	9135.70	67.32	1026	3.99
Kabupaten Madiun	2013	8.370	9654.10	68.07	1140	4.63
Kabupaten Madiun	2014	8.120	10169.70	68.60	1313	3.38

Kabupaten Madiun	2015	8.474	10704.87	69.39	1581	6.99
Kabupaten Madiun	2016	8.597	11268.90	69.67	1834	6.99
Kabupaten Madiun	2017	8.343	11876.5	70.27	2096	3.19
Kabupaten Magetan	2012	7.180	9251.20	69.56	1064	3.64
Kabupaten Magetan	2013	7.630	9792.60	69.86	1188	2.96
Kabupaten Magetan	2014	7.400	10291.70	70.29	1378	4.28
Kabupaten Magetan	2015	7.116	10823.92	71.39	1589	6.05
Kabupaten Magetan	2016	6.924	11398.13	71.94	1775	6.05
Kabupaten Magetan	2017	6.587	11978.1	72.60	1641	3.80
Kabupaten Ngawi	2012	13.170	9568.20	66.72	1167	2.94
Kabupaten Ngawi	2013	12.750	10094	67.25	1353	4.97
Kabupaten Ngawi	2014	12.320	10681	67.78	1585	5.61
Kabupaten Ngawi	2015	12.932	11223.12	68.32	1836	3.99
Kabupaten Ngawi	2016	12.665	11807.56	68.96	2036	3.99
Kabupaten Ngawi	2017	12.376	12405.5	69.27	2382	5.76
Kabupaten Bojonegoro	2012	20.390	38136.10	64.20	1693	3.41
Kabupaten Bojonegoro	2013	19.680	39039.40	64.85	2034	5.81
Kabupaten Bojonegoro	2014	19.090	39934.80	65.27	2416	3.21
Kabupaten Bojonegoro	2015	19.399	46892.81	66.17	2844	5.01
Kabupaten Bojonegoro	2016	18.099	57187.37	66.73	3244	5.01
Kabupaten Bojonegoro	2017	17.825	25464.9	67.28	2244	3.64
Kabupaten Tuban	2012	20.270	31816.30	63.36	1379	4.13
Kabupaten Tuban	2013	19.690	33678.80	64.14	1489	4.30
Kabupaten Tuban	2014	19.110	35519.90	64.58	1768	3.63
Kabupaten Tuban	2015	19.659	37256.03	65.52	1998	3.03
Kabupaten Tuban	2016	19.835	39081.76	66.19	2219	3.03
Kabupaten Tuban	2017	19.610	40535.6	66.77	2810	3.39
Kabupaten Lamongan	2012	19.790	18562.70	67.51	1473	4.75
Kabupaten Lamongan	2013	19.200	19848.80	68.90	1606	4.93
Kabupaten Lamongan	2014	18.610	21099.90	69.42	1913	4.30
Kabupaten Lamongan	2015	18.264	22316.88	69.84	2407	4.10
Kabupaten Lamongan	2016	17.692	23623.79	70.34	2796	4.10
Kabupaten Lamongan	2017	17.138	24928	71.11	2639	4.12
Kabupaten Gresik	2012	17.440	67248.80	72.12	1451	6.78
Kabupaten Gresik	2013	17.160	71314.20	72.47	1897	4.55
Kabupaten Gresik	2014	16.690	76336	72.84	2172	5.06
Kabupaten Gresik	2015	17.076	81380.44	73.57	2529	5.67
Kabupaten Gresik	2016	16.712	85850.11	74.46	2552	5.67
Kabupaten Gresik	2017	16.408	81949.9	74.84	3083	4.54

Kabupaten Bangkalan	2012	22.980	16173.70	59.65	1220	5.13
Kabupaten Bangkalan	2013	21.830	16204	60.19	1431	6.78
Kabupaten Bangkalan	2014	21.220	17369.20	60.71	1563	5.68
Kabupaten Bangkalan	2015	21.623	16906.84	61.49	1838	5
Kabupaten Bangkalan	2016	20.571	17018.65	62.06	1944	5
Kabupaten Bangkalan	2017	20.653	12351.8	62.30	2302	4.48
Kabupaten Sampang	2012	25.340	10910.90	55.78	991	1.71
Kabupaten Sampang	2013	24.820	11623.80	56.45	1085	4.68
Kabupaten Sampang	2014	23.960	11632.90	56.98	1273	2.22
Kabupaten Sampang	2015	24.035	11874.48	58.18	1704	2.51
Kabupaten Sampang	2016	22.780	12606.81	59.09	1778	2.51
Kabupaten Sampang	2017	22.513	10897.7	59.90	2115	2.48
Kabupaten Pamekasan	2012	16.080	7894	61.21	1100	2.29
Kabupaten Pamekasan	2013	15.370	8375.20	62.27	1167	2.17
Kabupaten Pamekasan	2014	14.880	8846.20	62.66	1385	2.14
Kabupaten Pamekasan	2015	14.692	9316.86	63.10	1751	4.26
Kabupaten Pamekasan	2016	14.232	9815.77	63.98	1864	4.26
Kabupaten Pamekasan	2017	13.777	10310.2	64.93	1719	3.91
Kabupaten Sumenep	2012	23.220	17665	60.08	1276	1.14
Kabupaten Sumenep	2013	22.550	20218.10	60.84	1421	2.56
Kabupaten Sumenep	2014	21.890	21476.90	61.43	1607	1.01
Kabupaten Sumenep	2015	21.684	21750.58	62.38	1958	2.07
Kabupaten Sumenep	2016	21.614	22311.69	63.42	2048	2.07
Kabupaten Sumenep	2017	21.192	17579.9	64.28	2059	1.83
Kota Kediri	2012	2.230	63185.10	73.66	843	8.12
Kota Kediri	2013	2.280	65408.80	74.18	871	7.92
Kota Kediri	2014	2.210	69232.90	74.62	979	7.66
Kota Kediri	2015	2.377	72945.53	75.67	1120	8.46
Kota Kediri	2016	2.364	76988.36	76.33	1484	8.46
Kota Kediri	2017	2.407	80946.2	77.13	1269	4.68
Kota Blitar	2012	910	3236.60	73.53	518	3.68
Kota Blitar	2013	1.010	3446.80	74.53	594	6.17
Kota Blitar	2014	980	3649.60	75.26	659	5.71
Kota Blitar	2015	1.004	3856.91	76	782	3.80
Kota Blitar	2016	997	4079.26	76.71	857	3.80
Kota Blitar	2017	1.122	4315	77.10	788	3.76
Kota Malang	2012	4.350	35355.70	78.04	1252	7.96
Kota Malang	2013	4.100	37547.70	78.44	1486	7.73
Kota Malang	2014	4.060	39724.70	78.96	1602	7.22

Kota Malang	2015	3.910	41952.13	80.05	1803	7.28
Kota Malang	2016	3.703	44303.90	80.46	1710	7.28
Kota Malang	2017	3.589	46824.8	80.65	1814	7.22
Kota Probolinggo	2012	2.430	5552.10	68.93	611	5.26
Kota Probolinggo	2013	1.920	5911.30	70.05	655	4.48
Kota Probolinggo	2014	1.900	6261.90	70.49	778	5.16
Kota Probolinggo	2015	1.866	6628.75	71.01	731	4.01
Kota Probolinggo	2016	1.837	7018.29	71.50	911	4.01
Kota Probolinggo	2017	1.823	7430.06	72.09	829	3.42
Kota Pasuruan	2012	1.510	4051.20	72.01	487	4.45
Kota Pasuruan	2013	1.460	4315.10	72.89	552	5.41
Kota Pasuruan	2014	1.420	4561.30	73.23	637	6.09
Kota Pasuruan	2015	1.452	4813.31	73.78	740	5.57
Kota Pasuruan	2016	1.493	5076.35	74.11	785	5.57
Kota Pasuruan	2017	1.485	5354.01	74.39	820	4.64
Kota Mojokerto	2012	800	3358.40	74.20	488	7.52
Kota Mojokerto	2013	830	3566.70	74.91	511	5.73
Kota Mojokerto	2014	800	3774.60	75.04	631	4.42
Kota Mojokerto	2015	772	3991.37	75.54	706	4.88
Kota Mojokerto	2016	724	4221.83	76.38	944	4.88
Kota Mojokerto	2017	728	4460.04	76.77	739	3.61
Kota Madiun	2012	930	6937.70	77.21	610	6.89
Kota Madiun	2013	870	7470.70	78.41	775	6.57
Kota Madiun	2014	850	7965.30	78.81	853	6.93
Kota Madiun	2015	855	8455.44	79.48	877	5.10
Kota Madiun	2016	905	8954.70	80.01	1031	5.10
Kota Madiun	2017	870	9486.01	80.13	1261	4.26
Kota Surabaya	2012	17.570	265892.10	78.05	4299	5.27
Kota Surabaya	2013	16.940	286050.70	78.51	5057	5.32
Kota Surabaya	2014	16.440	305947.60	78.87	5707	5.82
Kota Surabaya	2015	16.572	324215.17	79.47	6490	7.01
Kota Surabaya	2016	16.101	343652.60	80.38	7151	7.01
Kota Surabaya	2017	15.471	364709.7	81.07	7912	5.98
Kota Batu	2012	870	7473.60	70.62	435	3.51
Kota Batu	2013	940	8018.60	71.55	568	2.30
Kota Batu	2014	910	8572.10	71.89	632	2.43
Kota Batu	2015	943	9145.95	72.62	819	4.29
Kota Batu	2016	905	9750.91	73.57	819	4.29
Kota Batu	2017	7.639	10390.8	74.26	821	2.26

## 2. Hasil Regresi *Common Effect Model* (CEM)

Dependent Variable: KEM  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 06/21/19 Time: 13:03  
 Sample: 2012 2017  
 Periods included: 6  
 Cross-sections included: 38  
 Total panel (unbalanced) observations: 227

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	754.3986	40.69280	18.53887	0.0000
PDRB	-5.97E-05	9.79E-05	-0.610352	0.5423
IPM	-10.75784	0.612479	-17.56442	0.0000
PENGG	7.359052	1.975652	3.724873	0.0002
PEM	0.044946	0.004598	9.775924	0.0000
R-squared	0.731822	Mean dependent var	125.5728	
Adjusted R-squared	0.726989	S.D. dependent var	76.41711	
S.E. of regression	39.92825	Akaike info criterion	10.23383	
Sum squared resid	353926.9	Schwarz criterion	10.30926	
Log likelihood	-1156.539	Hannan-Quinn criter.	10.26427	
F-statistic	151.4517	Durbin-Watson stat	0.188273	
Prob(F-statistic)	0.000000			

## 3. Hasil Regresi *Fix Effect Model* (FEM)

Dependent Variable: KEM  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 06/21/19 Time: 13:03  
 Sample: 2012 2017  
 Periods included: 6  
 Cross-sections included: 38  
 Total panel (unbalanced) observations: 227

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	259.1094	26.47767	9.785959	0.0000
PDRB	6.16E-05	5.48E-05	1.123785	0.2626
IPM	-1.886507	0.399422	-4.723089	0.0000
PENGG	0.062581	0.316807	0.197536	0.8436
PEM	-0.003321	0.001147	-2.894298	0.0043

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)



R-squared	0.997767	Mean dependent var	125.5728
Adjusted R-squared	0.997272	S.D. dependent var	76.41711
S.E. of regression	3.991495	Akaike info criterion	5.771659
Sum squared resid	2947.427	Schwarz criterion	6.405350
Log likelihood	-613.0833	Hannan-Quinn criter.	6.027362
F-statistic	2015.875	Durbin-Watson stat	1.168881
Prob(F-statistic)	0.000000		

#### 4. Hasil Estimasi *Random Effect Model* (REM)

Dependent Variable: KEM  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 06/21/19 Time: 13:04  
Sample: 2012 2017  
Periods included: 6  
Cross-sections included: 38  
Total panel (unbalanced) observations: 227  
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	338.0117	25.09955	13.46684	0.0000
PDRB	9.78E-05	5.01E-05	1.950171	0.0524
IPM	-3.094653	0.369808	-8.368271	0.0000
PENGG	-0.178250	0.314579	-0.566631	0.5715
PEM	-0.000904	0.001073	-0.842073	0.4007

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		34.60724	0.9869
Idiosyncratic random		3.991495	0.0131

Weighted Statistics			
R-squared	0.352476	Mean dependent var	5.929758
Adjusted R-squared	0.340809	S.D. dependent var	6.047782
S.E. of regression	4.900001	Sum squared resid	5330.223
F-statistic	30.21107	Durbin-Watson stat	0.662657
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.247226	Mean dependent var	125.5728
Sum squared resid	993468.2	Durbin-Watson stat	0.003555

## 5. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	595.399827	(37,185)	0.0000
Cross-section Chi-square	1086.911843	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: KEM  
Method: Panel Least Squares  
Date: 06/21/19 Time: 13:04  
Sample: 2012 2017  
Periods included: 6  
Cross-sections included: 38  
Total panel (unbalanced) observations: 227

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	754.3986	40.69280	18.53887	0.0000
PDRB	-5.97E-05	9.79E-05	-0.610352	0.5423
IPM	-10.75784	0.612479	-17.56442	0.0000
PENGG	7.359052	1.975652	3.724873	0.0002
PEM	0.044946	0.004598	9.775924	0.0000
R-squared	0.731822	Mean dependent var		125.5728
Adjusted R-squared	0.726989	S.D. dependent var		76.41711
S.E. of regression	39.92825	Akaike info criterion		10.23383
Sum squared resid	353926.9	Schwarz criterion		10.30926
Log likelihood	-1156.539	Hannan-Quinn criter.		10.26427
F-statistic	151.4517	Durbin-Watson stat		0.188273
Prob(F-statistic)	0.000000			

## 6. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	115.871225	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PDRB	0.000062	0.000098	0.000000	0.1005
IPM	-1.886507	-3.094653	0.022780	0.0000
PENGG	0.062581	-0.178250	0.001407	0.0000
PEM	-0.003321	-0.000904	0.000000	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KEM

Method: Panel Least Squares

Date: 06/21/19 Time: 13:05

Sample: 2012 2017

Periods included: 6

Cross-sections included: 38

Total panel (unbalanced) observations: 227

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	259.1094	26.47767	9.785959	0.0000
PDRB	6.16E-05	5.48E-05	1.123785	0.2626
IPM	-1.886507	0.399422	-4.723089	0.0000
PENGG	0.062581	0.316807	0.197536	0.8436
PEM	-0.003321	0.001147	-2.894298	0.0043

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.997767	Mean dependent var	125.5728
Adjusted R-squared	0.997272	S.D. dependent var	76.41711
S.E. of regression	3.991495	Akaike info criterion	5.771659
Sum squared resid	2947.427	Schwarz criterion	6.405350
Log likelihood	-613.0833	Hannan-Quinn criter.	6.027362
F-statistic	2015.875	Durbin-Watson stat	1.168881
Prob(F-statistic)	0.000000		